

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem informasi akuntansi sangat berperan penting dalam menunjang pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prosedur yang ssemestinya agar dapat mempermudah dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan kepada pemerintah yang berkaitan dengan APBD desa, Sistem Informasi Akuntansi sangat berperan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES).

Didalam menyiapkan informasi akuntansi terkait pelaksanaan APBDes diperlukan suatu sistem yaitu sistem informasi akuntansi (SIA). Menurut Bodnar 2003 sistem informasi akuntansi adalah kumpulan yang sumber dayanya seperti manusia dan peralatan yang dapat dirancang untuk dapat mengubah data keuangan dan data lainnya menjadikan sebuah informasi yang akurat. Dalam informasi akuntansi memiliki tujuan sebagai mendukung oprasi oprasi sehari hari dan sistem akuntansi memiliki bagian yang disebut TPS (transaction processing system) yang dapat mengelola data transaksi dijadikan informasi yang sangat berguna dalam oprasi kegiatan sehari hari. Selain itu sitem informasi juga memiliki tujuan yang untuk memenuhi kewajiban yang memiliki hubungan dengan pertanggung jawaban.

Pemerintah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah pusat dan terletak di kabupaten. pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan di segala dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tugas pembantuan yang merupakan satu kesatuan pembangunan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang meliputi kehidupan dan penghidupan publik, upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan Desa dapat terakomodasi dengan lebih baik. Memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus pemerintahan pemerintah sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti disparitas wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lain dapat diminimalisir. UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksananya adalah memerintahkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaannya milik pemerintah dan berbagai sumber daya alam, antara lain pengelolaan keuangan dan aset desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang hukum dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan yang dihadapi atau dialami oleh masyarakat setempat, berdasarkan adat istiadat yang berada pada desa yang diakui pada sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Desa sangat berfungsi sangat penting sebagai ujung tombak dalam

pelaksanaan pembangunan atau perdanaan disegala bidang baik dalam bidang pemerintahan, bagian integral dari negara republik indonesia membangun desa juga bisa disebut sebagai pembangunan penduduk indonesia. Berdiri mengikuti perkembangan desa sangat mudah dimengerti karena hal ini sangat mudah dimengerti karena lebih besar persentase penduduk di desa desa indonesia sagat besar.

Dalam oprasional desa dalam mewujudkan otonomi yang telah diberikan kepada desa terdapat beberapa pembiayaan, dimana dalam pembiayaan tersebut sangat berhubungan dengan dana yang dimiliki desa sehingga pemerintahan daerah atau kabupaten akan memberikan dana desa kepada setiap desa yang berada diwilayah tersebut. Hal ini tercantum pada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang beriiisikan tentang bahwa keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang terkait dengan kewajiban desa yang dapat menimbulkan suatu pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan dan juga penelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas, selain prinsip akuntabilitas pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip transparansi dalam setiap realisasi pelaksanaan APBDes. Transparansi memiliki prinsip keterbukaan atas tindakan dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, desa dan masyarakat mealui informasi dan juga kejaminan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan menandai tentang pelaksanaan APBDes.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perekonomian suatu negara. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari masalah ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian meningkat, Desa sebagai pemerintahan otonom dengan diberikan hak khusus, selain itu provinsi juga berstatus sebagai otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran dana desa sering disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintahan desa menjadi salah satu program yang sangat penting yaitu program pembangunan desa selain itu pemerintah desa juga sebagai Pembina dalam kepemimpinan dan juga pelayanan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dalam meningkatkan kapasitas desa pemerintah harus teliti dalam mengatasi permasalahan dana desa yang sedang dihadapi. Dalam pengelolaan asset pada desa yang diperlukan dalam hal ini yaitu peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan juga dalam program yang akan dijalani pada saat itu selain itu sangat perlu dilakukan sebuah pembinaan kepada masyarakat.

Sebuah kedudukan otonomi desa diharuskan dicirikan dengan penggunaan atribut desa. Kedudukan desa sebagai wilayah dalam otonomi desa mempunyai tujuan dalam pendekatan pelayanan dalam masyarakat, dalam penyaluran dana desa juga sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Desa adat merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah, desa adat sanggalangit merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Sistem informasi akuntansi sangat bermanfaat di desa sanggalangit karena dalam sistem ini masyarakat akan mengetahui bagaimana dalam penerapan anggaran dana desa apakah sudah dilaksanakan dengan maksimal. Dengan diterapkannya APBDes masyarakat dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa sanggalangit.

Sistem Informasi di desa sanggalangit cukup maksimal dalam memberikan informasi terkait keuangan desa dan juga pembangunan desa sanggalangit, Berdasarkan informasi yang telah didapat dari beberapa masyarakat setempat terkait dalam pelaksanaan APBDes desa hal ini dilihat dalam penyaluran BLT yang dicairkan setiap bulan secara tunai. APBDes desa sanggalangit dimanfaatkan sebagai beberapa kegiatan diantaranya 50% dipergunakan sebagai pembangunan desa, 30% dipergunakan sebagai bantuan PKH dan BLT dan 20% dipergunakan sebagai posyandu.

Tetapi beberapa masyarakat desa sanggalangit ini banyak mengeluh tentang pembangunan jembatan penghubung jalan, yang masih belum dilakukan secara maksimal, hal ini dapat dilihat pada salah satu jembatan penghubung yang jebol dikarenakan penyumbatan air sungai yang dikarenakan sampah pohon bambu. Masyarakat setempat masih belum mendapatkan informasi yang akurat tentang pembangunan jembatan yang jebol, hal ini mengakibatkan perselisihan antara pemerintah desa dan masyarakat desa sanggalangit. Secara

sistem informasi akuntansi dalam penerapan APBDes masih belum maksimal dijalankan hal ini dapat dilihat dari pembangunan jembatan penghubung yang ada disalah satu daerah desa sanggalangit masih belum bisa diproses hingga sekarang. Hal ini membuat masyarakat setempat dengan pemerintah desa mengalami perselisihan yang cukup berat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut adanya program APBDes deangan yang penulis rangkum dalam sebuah penelitian berjudul : **PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PELAKSANAAN APBDes SANGGALANGIT KECAMATAN. GEROKGAK KABUPATEN. BULELENG**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDES yang dilaksanakan oleh pemerintah pada desa sanggalangit?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam penerapan sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan APBDES yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sanggalangit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan pada Desa Sanggalangit adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDES yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sanggalangit.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDES yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sanggalangit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan, diharapkan bisa memberi manfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan serta pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBD Desa

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan APBDes dalam memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembuatan laporan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengguna akuntansi, khususnya untuk aparaturnya desa dalam membuat laporan

pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### 4. Manfaat Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai masukan bagi pengembangan Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dan Jurusan Akuntansi Diploma III.

